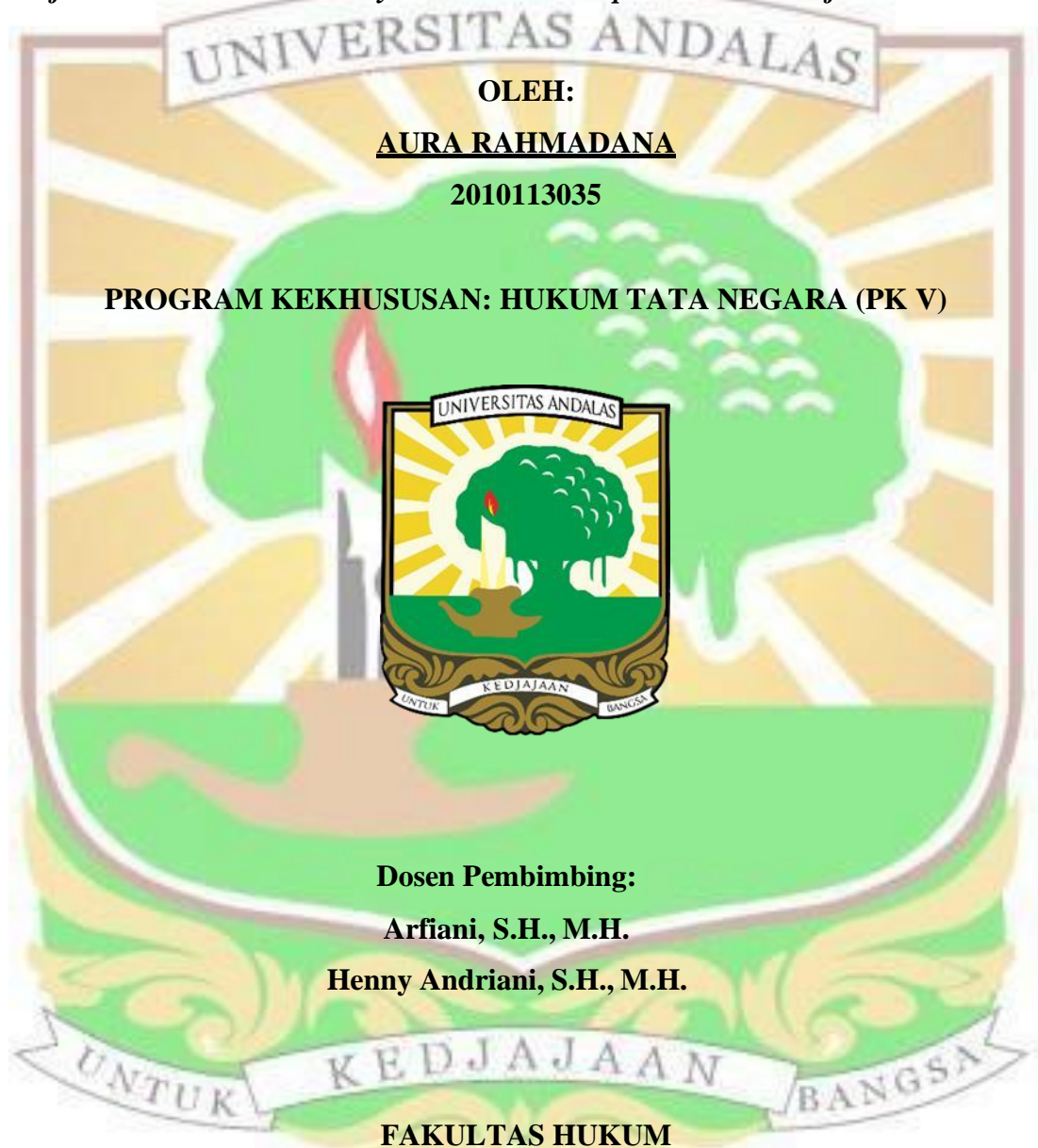


SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ANDALAS

OLEH:

AURA RAHMADANA

2010113035

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Dosen Pembimbing:

Arfiani, S.H., M.H.

Henny Andriani, S.H., M.H.

UNTUK

KEDJAJAAN


BANGSA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
|  | No. Alumni Universitas | Nama Mahasiswa: AURA RAHMADANA | No. Alumni Fakultas : |
| | a) Tempat/tgl lahir : Jakarta/30 November 2002 | f) Tanggal Lulus : 7 Mei 2024 | g) Predikat Lulus : Cumlaude |
| b) Nama Orang Tua : Nasrun, Mashairani | h) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan | i) IPK : 3,71 | j) Alamat : Jakarta Timur |
| c) Fakultas : Hukum | | | |
| d) PK : Hukum Tata Negara | | | |
| e) No BP : 2010113035 | | | |

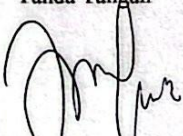

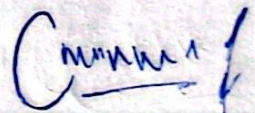
"POLITIK HUKUM PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"

Aura Rahmadana, 2010113035, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2024.

ABSTRAK

Setelah Negara Republik Indonesia merdeka, jabatan kepala desa tetap ada dan masih terkenal dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan tersebut jabatan kepala desa dianggap sebagai jabatan paling bermartabat bagi segelintir orang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sumber hukum paling kuat untuk tata kelola pemerintahan di wilayah pedesaan. Dalam Undang-Undang Desa ini mengatur masalah-masalah pokok yang berhubungan dengan masa periode jabatan kepala desa. Kepala desa dapat memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjadi kembali sebanyak tiga kali. Dengan demikian, dalam aturan tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan karena dianggap menyebabkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: *Pertama*, Bagaimana dinamika perkembangan politik hukum periode masa jabatan kepala desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? *Kedua*, Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari periode masa jabatan kepala desa? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Dari hasil penelitian *pertama*, peraturan tentang masa jabatan kepala desa mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, Dalam dinamika perubahan tersebut sangat bergantung pada factor filosofis, yuridis dan sosiologis yang mempengaruhi ketentuan tersebut dibuat. *Kedua*, dengan panjangnya masa jabatan kepala desa, kepala desa mempunyai kesempatan membangun desa secara terstruktur dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa. Namun, masih banyak kekurangan dalam peraturan periode masa jabatan kepala desa yaitu menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan seperti praktik nepotisme dan korupsi.

Penguji,

| | | |
|---|---|---|
| Tanda Tangan  | 1.  | 2.  |
| Aura Rahmadana | Delfina Gusman, S.H., M.H. | Beni Kharisma Arrasuli, S.HI., LL.M. |

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Arfiani, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

| | | |
|------------------------|-------|----------------------|
| No. Alumni Fakultas | Nama: | Fakultas/Universitas |
| No. Alumni Universitas | Nama: | Tanda Tangan. |
| | | Tanda Tangan. |